

## ANALISIS PERHITUNGAN NILAI KINI KEWAJIBAN IMBALAN PASTI (NKKIP) UNTUK PENSIUN NORMAL BERDASARKAN PERATURAN PERUNDANGAN PADA BUNGA KONVEKSI

Nanda Villa Ronitasari<sup>1</sup>, Y Jhony Kurniawan<sup>2</sup>, I Nyoman Winata<sup>3</sup>

<sup>1</sup>Program Studi S1 Manajemen, Sekolah Tinggi Manajemen Asuransi Trisakti

<sup>2</sup>Program Studi D3 Asuransi Jiwa & Asuransi Kerugian, Sekolah Tinggi Manajemen Asuransi Trisakti

<sup>3</sup>Program Studi D3 Asuransi Jiwa, Sekolah Tinggi Manajemen Asuransi Trisakti

email: [nandaviella@gmail.com](mailto:nandaviella@gmail.com)<sup>1</sup>, [jhonykurniawan199@gmail.com](mailto:jhonykurniawan199@gmail.com)<sup>2</sup>, [nyoman\\_stma@yahoo.com](mailto:nyoman_stma@yahoo.com)<sup>3</sup>

### ABSTRAK

Pernyataan Standar Akuntansi Keuangan (PSAK) adalah kerangka acuan dalam proses yang berkaitan dengan penyajian laporan keuangan di Indonesia. Secara umum PSAK 24 adalah mengatur pernyataan akuntansi tentang imbalan kerja di perusahaan. Penerapan PSAK 24 sendiri dilatarbelakangi oleh Undang-Undang Ketenagakerjaan Nomor 13 Tahun 2003, akan tetapi pada tahun 2020 diterbitkan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 dengan peraturan pelaksanaannya pada Peraturan Pemerintah Nomor 35 Tahun 2021. Hal ini mengakibatkan besaran faktor dalam perusahaan menghitung kewajiban/liabilitas akan berubah, terutama untuk menghitung Nilai Kini Kewajiban Imbalan Pasti (NKKIP) untuk pensiun normal. Dalam perhitungan NKKIP menggunakan data karyawan Bunga Konveksi. Tujuan penelitian ini untuk mengetahui hasil perhitungan Nilai NKKIP untuk Pensiun Normal sesuai dengan peraturan di atas lalu menganalisis dari kedua hasil perhitungan tersebut dan mengimplementasikan pada Bunga Konveksi. Adapun metode penelitian yang digunakan adalah metode analisis deskriptif kuantitatif dengan perhitungan NKKIP menggunakan metode *Projected Unit Credit* (PUC). Hasil dari perhitungan NKKIP dengan menggunakan data karyawan Bunga Konveksi yaitu NKKIP untuk pensiun normal sesuai Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 **lebih tinggi** dibandingkan NKKIP untuk pensiun normal sesuai Peraturan Pemerintah Nomor 35 Tahun 2021.

**Kata kunci:** NKKIP, Pensiun Normal, Peraturan

### ABSTRACT

*Statement of Financial Accounting Standards (PSAK) is a frame of reference in processes relating to the presentation of financial statements in Indonesia. In general, PSAK 24 regulates accounting statements regarding employee benefits in companies. The application of PSAK 24 itself is motivated by the Manpower Act Number 13 of 2003, but in 2020, Law Number 11 of 2020 was issued with its implementing regulations in Government Regulation Number 35 of 2021. This resulted in the magnitude of the factor in the company calculating obligations/liabilities will change, especially for calculating the Present Value of Defined Benefit Obligations (NKKIP) for normal pensions. In the calculation of the NKKIP using Convection Interest employee data. The purpose of this study is to find out the results of calculating the Present Value of Benefit Obligation for Normal Pension according to the above rules and then analyze the results of the two calculations and implement it on Bunga Konveksi. The research method used is descriptive quantitative analysis method with NKKIP calculations using the Projected Unit Credit (PUC) method. The results of the NKKIP calculation using Bunga Konveksi employee data, the NKKIP for normal pensions according to Law Number 13 of 2003 is higher than the NKKIP for normal pensions according to Government Regulation Number 35 of 2021.*

**Keywords:** NKKIP, Normal Pension, Regulations

DOI: <https://doi.org/10.35904/premium.v9i1.21>

## 1. PENDAHULUAN

Pernyataan Standar Akuntansi Keuangan (PSAK) adalah kerangka acuan dalam proses yang berkaitan dengan penyajian laporan keuangan di Indonesia dimana dibuat oleh Ikatan Akuntan Indonesia (IAI). Secara umum PSAK 24 sendiri itu mengatur pernyataan akuntansi tentang imbalan kerja di perusahaan. Penerapan PSAK 24 dilatarbelakangi oleh Undang-Undang Ketenagakerjaan Nomor 13 Tahun 2003 tentang Imbalan Kerja yang mengatur secara umum mengenai tata cara pemberian imbalan-imbalan di perusahaan, mulai dari imbalan istirahat panjang sampai dengan imbalan Pemutusan Hubungan Kerja (PHK).

Dengan berlakunya Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 ini mengakibatkan perusahaan akan dibebani dengan jumlah pembayaran pesangon yang tinggi terutama untuk perusahaan yang memiliki jumlah karyawan ribuan orang. Oleh karena itu, untuk mengantisipasi kemungkinan terganggunya cash flow perusahaan akibat dari ketentuan dalam Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 tersebut, maka PSAK 24 mengharuskan perusahaan untuk membukukan pencadangan atas kewajiban pembayaran pesangon/imbalan kerja dalam laporan keuangannya.

Salah satu ketentuan di Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 adalah mengenai imbalan pasca kerja yaitu imbalan yang harus diberikan perusahaan kepada karyawan ketika karyawan sudah berhenti bekerja. Di mana dalam Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 sendiri sudah diatur besaran faktor kali Uang Pesangon, Uang Penghargaan Masa Kerja dan Uang Penggantian Hak.

Akan tetapi pada November tahun 2020, resmi diterbitkan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja. Di mana dalam Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 mengatur tentang ketentuan besaran pesangon, uang penghargaan masa kerja dan uang penggantian hak. Dengan berlakunya Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 ini, ketentuan dalam Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 sudah tidak berlaku kembali. Ketentuan yang tertuang dalam Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 masih belum sepenuhnya detail atau terinci. Maka dari itu diterbitkanlah Peraturan Pemerintah Nomor 35 Tahun 2021 tentang perjanjian kerja waktu tertentu, alih daya, waktu kerja dan waktu istirahat dan pemutusan hubungan kerja. Pada Peraturan Pemerintah Nomor 35 Tahun 2021 mengatur besaran uang Pesangon, uang Penghargaan Masa Kerja dan uang Penggantian Hak dan besaran faktor kali untuk imbalan pasca kerja sebagaimana menjadi turunan aturan dalam Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tersebut.

Tabel 1 Perbandingan Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 dengan Peraturan Pemerintah Nomor 35 Tahun 2021 Terkait Besaran Uang Pesangon, Uang Penghargaan Masa Kerja dan Uang Penggantian Hak

| No. | Keterangan                        | UUK 13 tahun 2003 Pasal 156 | PP 35 tahun 2021 Pasal 40   |
|-----|-----------------------------------|-----------------------------|---|
| 1.  | Besar Uang Pesangon               |                             | Masa kerja < 1 th : 1 bulan upah<br>Masa kerja 1 -< 2 th : 2 bulan upah<br>Masa kerja 2 -< 3 th : 3 bulan upah<br>Masa kerja 3 -< 4 th : 4 bulan upah<br>Masa kerja 4 -< 5 th : 5 bulan upah<br>Masa kerja 5 -< 6 th : 6 bulan upah<br>Masa kerja 6 -< 7 th : 7 bulan upah<br>Masa kerja 7 -< 8 th : 8 bulan upah<br>Masa kerja > 8 th : 9 bulan upah |
| 2.  | Besar Uang Penghargaan Masa Kerja |                             | Masa kerja 3 -< 6 th : 2 bulan upah<br>Masa kerja 6 -< 9 th : 3 bulan upah<br>Masa kerja 9 -< 12 th : 4 bulan upah<br>Masa kerja 12 -< 15 th : 5 bulan upah<br>Masa kerja 15 -< 18 th : 6 bulan upah<br>Masa kerja 18 -< 21 th : 7 bulan upah<br>Masa kerja 21 -< 24 th : 8 bulan upah<br>Masa kerja > 24 th : 10 bulan upah                          |

|    |                      |   |   |
|----|----------------------|---|---|
| 3. | Uang Penggantian Hak | a) cuti tahunan yang belum diambil dan belum gugur;<br>b) biaya atau ongkos pulang untuk pekerja/ buruh dan keluarganya ke tempat di mana pekerja/ buruh diterima bekerja;<br>c) penggantian perumahan serta pengobatan dan perawatan ditetapkan 15% (lima belas per seratus) dari uang pesangon dan/atau uang penghargaan masa kerja bagi yang memenuhi syarat;<br>d) hal-hal lain yang ditetapkan dalam perjanjian kerja, peraturan perusahaan atau perjanjian kerja bersama. | a) cuti tahunan yang belum diambil dan belum gugur;<br>b) biaya atau ongkos pulang untuk pekerja/ buruh dan keluarganya ke tempat di mana pekerja/ buruh diterima bekerja;<br>c) hal-hal lain yang ditetapkan dalam perjanjian kerja, peraturan perusahaan atau perjanjian kerja bersama. |
|----|----------------------|---|---|

Sumber : Undang-undang Ketenagakerjaan Nomor 13 Tahun 2003 dan Peraturan Pemerintah Nomor 35 Tahun 2021

Tabel 2 Perbandingan Besaran Faktor Kali untuk Imbalan Pasca Kerja

| No | Keterangan  | UUK 13 tahun 2003  | PP 35 tahun 2021   |
|----|---|--|--|
| 1. | Undur Diri (UUK13 Pasal 162) (PP35 Pasal 55)                      | (1 x FPH sesuai UUK13) x Upah  | (1 x FPH sesuai PP35) x Upah   |
| 2. | Meninggal dunia (UUK13 Pasal 166) (PP35 Pasal 58)                 | (2 x FP sesuai UUK13; ditambah 1 x FPMK sesuai UUK13; ditambah 1 x FPH sesuai UUK13) x Upah  | (2 x FP sesuai PP35; ditambah 1 x FPMK sesuai PP35; ditambah 1 x FPH sesuai PP35) x Upah     |
| 3. | Cacat atau sakit berkepanjangan (UUK13 Pasal 172) (PP35 Pasal 57) | (2 x FP sesuai UUK13; ditambah 2 x FPMK sesuai UUK13; ditambah 1 x FPH sesuai UUK13) x Upah  | (2 x FP sesuai PP35; ditambah 1 x FPMK sesuai PP35; ditambah 1 x FPH sesuai PP35) x Upah     |
| 4. | Pensiun (UUK13 Pasal 167) (PP35 Pasal 59)                         | (2 x FP sesuai UUK13; ditambah 1 x FPMK sesuai UUK13; ditambah 1 x FPH sesuai UUK13) x Upah. | (1,75 x FP sesuai PP35; ditambah 1 x FPMK sesuai PP35; ditambah 1 x FPH sesuai PP35) x Upah. |

Sumber : Undang-undang Ketenagakerjaan Nomor 13 Tahun 2003 dan Peraturan Pemerintah Nomor 35 Tahun 2021

Bunga Konveksi merupakan salah satu industri konveksi yang ada di Jawa Tengah tepatnya di daerah Sukoharjo. Bunga Konveksi sendiri sudah berdiri pada tahun 2016 dan sekarang sudah memiliki 26 karyawan tetap. Perusahaan konveksi merupakan jenis usaha dalam pembuatan pakaian jadi secara masal atau besar-besaran.

Maka dari itu, penulis sangat tertarik untuk membahas dan menjelaskan lebih lanjut mengenai perbedaan dari kedua peraturan diatas yang sama-sama menjadi aturan dalam menghitung imbalan pasca kerja oleh perusahaan. Maka dari itu penulis menyusunnya menjadi satu karya ilmiah dalam bentuk skripsi yang berjudul Analisis Perhitungan Nilai Kini Kewajiban Imbalan Pasti (NKKIP) untuk Pensiun Normal Berdasarkan Peraturan Perundangan pada Bunga Konveksi.

## 2. METODE PENELITIAN

Metode penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode analisis deskriptif kuantitatif. Adapun Teknik analisis data dalam penelitian dilakukan dengan mengumpulkan data lalu mengolah data tersebut sehingga menghasilkan angka yang nantinya dari angka tersebut dilakukan analisis untuk diambil kesimpulannya.

### a. Pengumpulan Data

Pengumpulan data dilakukan dengan studi dokumen, yaitu metode pengumpulan data yang tidak ditujukan langsung kepada subjek penelitian.

b. Pengolahan Data

Pengolahan data yang dilakukan pada data pegawai perusahaan yaitu menghitung Nilai Kini Kewajiban Imbalan Pasti (NKKIP) dengan metode Projectd Unit Credit (PUC).

Adapun rumusan NKKIP untuk pensiun normal dalam buku PSAK 24 (Revisi 2004) sebagai berikut.

$$Service\ Cost\ (SC_n) = \frac{1}{m} \left\{ \sum_{t=1}^m \frac{(1+j)^{m-n}}{(1+i)^{m-n}} \right\}$$

$$Present\ Value\ Benefit\ Obligation\ (PVBO_n) = \sum_{t=1}^m \frac{(1+j)^{m-n}}{(1+i)^{m-n}} - (m-n)SC_n$$

$$Hasil\ NKKIP = PVBO_n \times Faktor\ Manfaat\ sesuai\ Peraturan \times Upah$$

Keterangan :

- $n$  = Masa kerja lalu
- $m$  = Masa kerja total
- $SC_n$  = Biaya jasa kini pada periode  $n$
- $PVBO_n$  = Nilai kini kewajiban pada periode  $n$
- $i$  = Tingkat diskonto
- $j$  = Tingkat kenaikan upah

Berikut tabel manfaat sesuai dengan ketentuan peraturan yang berlaku.

Tabel 3 Manfaat Sesuai Dengan Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003

| Masa Kerja | Faktor Pesangon | Faktor PMK | Faktor UPH | Pensiun Normal |
|------------|-----------------|------------|------------|----------------|
| 0          | 1               | 0          | 15%        | 2,3            |
| 1          | 2               | 0          | 15%        | 4,6            |
| 2          | 3               | 0          | 15%        | 6,9            |
| 3          | 4               | 2          | 15%        | 11,5           |
| 4          | 5               | 2          | 15%        | 13,8           |
| 5          | 6               | 2          | 15%        | 16,1           |
| 6          | 7               | 3          | 15%        | 19,55          |
| 7          | 8               | 3          | 15%        | 21,85          |
| 8          | 9               | 3          | 15%        | 24,15          |
| 9          | 9               | 4          | 15%        | 25,3           |
| 10         | 9               | 4          | 15%        | 25,3           |
| 11         | 9               | 4          | 15%        | 25,3           |
| 12         | 9               | 5          | 15%        | 26,45          |
| 13         | 9               | 5          | 15%        | 26,45          |
| 14         | 9               | 5          | 15%        | 26,45          |
| 15         | 9               | 6          | 15%        | 27,6           |
| 16         | 9               | 6          | 15%        | 27,6           |
| 17         | 9               | 6          | 15%        | 27,6           |
| 18         | 9               | 7          | 15%        | 28,75          |
| 19         | 9               | 7          | 15%        | 28,75          |
| 20         | 9               | 7          | 15%        | 28,75          |
| 21         | 9               | 8          | 15%        | 29,9           |
| 22         | 9               | 8          | 15%        | 29,9           |
| 23         | 9               | 8          | 15%        | 29,9           |
| 24         | 9               | 10         | 15%        | 32,2           |
| 25         | 9               | 10         | 15%        | 32,2           |

| Masa Kerja | Faktor Pesangon | Faktor PMK | Faktor UPH | Pensiun Normal |
|------------|-----------------|------------|------------|----------------|
| 26         | 9               | 10         | 15%        | 32,2           |
| 27         | 9               | 10         | 15%        | 32,2           |
| 28         | 9               | 10         | 15%        | 32,2           |
| 29         | 9               | 10         | 15%        | 32,2           |
| 30         | 9               | 10         | 15%        | 32,2           |
| 31         | 9               | 10         | 15%        | 32,2           |
| 32         | 9               | 10         | 15%        | 32,2           |
| 33         | 9               | 10         | 15%        | 32,2           |
| 34         | 9               | 10         | 15%        | 32,2           |
| 35         | 9               | 10         | 15%        | 32,2           |
| 36         | 9               | 10         | 15%        | 32,2           |
| 37         | 9               | 10         | 15%        | 32,2           |
| 38         | 9               | 10         | 15%        | 32,2           |
| 39         | 9               | 10         | 15%        | 32,2           |
| 40         | 9               | 10         | 15%        | 32,2           |
| 41         | 9               | 10         | 15%        | 32,2           |
| 42         | 9               | 10         | 15%        | 32,2           |
| 43         | 9               | 10         | 15%        | 32,2           |
| 44         | 9               | 10         | 15%        | 32,2           |
| 45         | 9               | 10         | 15%        | 32,2           |
| 46         | 9               | 10         | 15%        | 32,2           |
| 47         | 9               | 10         | 15%        | 32,2           |
| 48         | 9               | 10         | 15%        | 32,2           |
| 49         | 9               | 10         | 15%        | 32,2           |
| 50         | 9               | 10         | 15%        | 32,2           |

Sumber : Undang-undang Ketenagakerjaan Nomor 13 Tahun 2003

Tabel 4 Manfaat Sesuai Dengan Peraturan Pemerintah Nomor 35 Tahun 2021

| Masa Kerja | Faktor Pesangon | Faktor PMK | Faktor UPH | Pensiun Normal |
|------------|-----------------|------------|------------|----------------|
| 0          | 1               | 0          | -          | 1,75           |

| Masa Kerja | Faktor Pesangon | Faktor PMK | Faktor UPH | Pensiun Normal |
|------------|-----------------|------------|------------|----------------|
| 26         | 9               | 10         | -          | 25,75          |

| Masa Kerja | Faktor Pesangon | Faktor PMK | Faktor UPH | Pensiun Normal | Masa Kerja | Faktor Pesangon | Faktor PMK | Faktor UPH | Pensiun Normal |
|------------|-----------------|------------|------------|----------------|------------|-----------------|------------|------------|----------------|
| 1          | 2               | 0          | -          | 3,50           | 27         | 9               | 10         | -          | 25,75          |
| 2          | 3               | 0          | -          | 5,25           | 28         | 9               | 10         | -          | 25,75          |
| 3          | 4               | 2          | -          | 9,00           | 29         | 9               | 10         | -          | 25,75          |
| 4          | 5               | 2          | -          | 10,75          | 30         | 9               | 10         | -          | 25,75          |
| 5          | 6               | 2          | -          | 12,50          | 31         | 9               | 10         | -          | 25,75          |
| 6          | 7               | 3          | -          | 15,25          | 32         | 9               | 10         | -          | 25,75          |
| 7          | 8               | 3          | -          | 17,00          | 33         | 9               | 10         | -          | 25,75          |
| 8          | 9               | 3          | -          | 18,75          | 34         | 9               | 10         | -          | 25,75          |
| 9          | 9               | 4          | -          | 19,75          | 35         | 9               | 10         | -          | 25,75          |
| 10         | 9               | 4          | -          | 19,75          | 36         | 9               | 10         | -          | 25,75          |
| 11         | 9               | 4          | -          | 19,75          | 37         | 9               | 10         | -          | 25,75          |
| 12         | 9               | 5          | -          | 20,75          | 38         | 9               | 10         | -          | 25,75          |
| 13         | 9               | 5          | -          | 20,75          | 39         | 9               | 10         | -          | 25,75          |
| 14         | 9               | 5          | -          | 20,75          | 40         | 9               | 10         | -          | 25,75          |
| 15         | 9               | 6          | -          | 21,75          | 41         | 9               | 10         | -          | 25,75          |
| 16         | 9               | 6          | -          | 21,75          | 42         | 9               | 10         | -          | 25,75          |
| 17         | 9               | 6          | -          | 21,75          | 43         | 9               | 10         | -          | 25,75          |
| 18         | 9               | 7          | -          | 22,75          | 44         | 9               | 10         | -          | 25,75          |
| 19         | 9               | 7          | -          | 22,75          | 45         | 9               | 10         | -          | 25,75          |
| 20         | 9               | 7          | -          | 22,75          | 46         | 9               | 10         | -          | 25,75          |
| 21         | 9               | 8          | -          | 23,75          | 47         | 9               | 10         | -          | 25,75          |
| 22         | 9               | 8          | -          | 23,75          | 48         | 9               | 10         | -          | 25,75          |
| 23         | 9               | 8          | -          | 23,75          | 49         | 9               | 10         | -          | 25,75          |
| 24         | 9               | 10         | -          | 25,75          | 50         | 9               | 10         | -          | 25,75          |
| 25         | 9               | 10         | -          | 25,75          |            |                 |            |            |                |

Sumber : Peraturan Pemerintah Nomor 35 Tahun 2021

### c. Analisis Data

Hasil NKKIP yang sudah dihitung dengan tabel 3 dan tabel 4 pada Bunga Konveksi, dibandingkan dan analisis atau dideskripsikan. Menjelaskan Perbedaan hasil dengan menggunakan aturan Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 dan Peraturan Pemerintah Nomor 35 Tahun 2021.

## 3. HASIL DAN PEMBAHASAN

### 3.1 Sejarah Perusahaan

Bunga konveksi merupakan salah satu industri konveksi yang ada di Jawa Tengah tepatnya di daerah Sukoharjo. Bunga konveksi sendiri sudah berdiri pada tahun 2016 yang berawal dari konveksi rumahan dengan karyawan kurang dari 10 (sepuluh) orang, sekarang sudah berkembang dengan memiliki karyawan tetap sebanyak 26 (dua puluh enam) orang.

Bunga konveksi memproduksi pembuatan pakaian jadi secara masal atau besar-besaran. Akan tetapi pakaian jadi yang di produksi bunga konveksi hanya pakaian jadi khusus wanita seperti kemeja, atasan blus dan satu set pakaian gamis.

Tabel 5 Data Karyawan Bunga Konveksi

| No | Nama Pegawai | Jenis Kelamin | Tanggal Lahir | Tanggal Mulai Bekerja | Upah Pokok |
|----|--------------|---------------|---------------|-----------------------|------------|
| 1  | Bunga13      | P             | 20/01/1978    | 04/02/2016            | 2.100.000  |
| 2  | Bunga14      | P             | 02/09/1968    | 04/02/2016            | 2.100.000  |
| 3  | Bunga25      | P             | 05/11/1970    | 30/03/2016            | 2.100.000  |
| 4  | Bunga10      | P             | 19/12/1978    | 05/04/2016            | 2.100.000  |
| 5  | Bunga01      | P             | 03/02/1990    | 14/04/2016            | 2.400.000  |
| 6  | Bunga04      | P             | 20/08/1979    | 02/06/2016            | 2.100.000  |
| 7  | Bunga02      | P             | 31/12/1973    | 01/01/2017            | 1.950.000  |
| 8  | Bunga03      | P             | 21/04/1984    | 28/01/2017            | 1.950.000  |
| 9  | Bunga18      | P             | 13/05/1967    | 17/05/2017            | 1.950.000  |
| 10 | Bunga06      | P             | 23/08/1974    | 02/11/2017            | 1.950.000  |
| 11 | Bunga19      | P             | 22/03/1983    | 01/07/2018            | 1.800.000  |
| 12 | Bunga05      | P             | 22/02/1982    | 13/10/2018            | 1.800.000  |
| 13 | Bunga08      | P             | 03/04/1986    | 04/11/2018            | 1.800.000  |

|    |         |   |            |            |           |
|----|---------|---|------------|------------|-----------|
| 14 | Bunga11 | P | 21/12/1990 | 10/01/2019 | 1.650.000 |
| 15 | Bunga12 | P | 20/10/1989 | 07/02/2019 | 1.650.000 |
| 16 | Bunga09 | P | 22/09/1986 | 03/03/2019 | 1.650.000 |
| 17 | Bunga24 | P | 24/08/1985 | 24/04/2019 | 1.650.000 |
| 18 | Bunga07 | P | 02/06/1989 | 26/12/2019 | 1.650.000 |
| 19 | Bunga15 | P | 13/06/1993 | 02/01/2020 | 1.500.000 |
| 20 | Bunga22 | P | 04/11/1997 | 05/01/2020 | 1.500.000 |
| 21 | Bunga23 | P | 11/04/1995 | 10/02/2020 | 1.500.000 |
| 22 | Bunga16 | P | 06/05/1995 | 18/02/2020 | 1.500.000 |
| 23 | Bunga17 | P | 05/11/1995 | 17/05/2020 | 1.500.000 |
| 24 | Bunga20 | P | 18/12/1995 | 10/07/2020 | 1.500.000 |
| 25 | Bunga21 | P | 23/02/1996 | 02/10/2020 | 1.500.000 |
| 26 | Bunga26 | P | 30/10/1996 | 12/10/2020 | 1.500.000 |

### 3.2 Kondisi terkini terkait Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020

Pada tanggal 25 November 2021, Mahkamah Konstitusi (MK) menggelar sidang putusan yang dibacakan oleh Ketua MK Anwar Usman dalam putusan Nomor 91/PUU-XVIII/2020 terkait Pengujian Formil Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja terhadap Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.

Hasil dari sidang putusan tersebut seperti yang tertulis dalam berita website Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia pada tanggal 25 November 2021 yaitu MK menyatakan bahwa Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja inkonstitusionalitas bersyarat. Dimana Undang-Undang tersebut tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat secara bersyarat sepanjang tidak melakukan perbaikan dalam waktu 2 (dua) tahun sejak putusan diucapkan.

Mengingat keputusan MK terkait hal di atas, perusahaan yang menghitung Nilai Kini Kewajiban Imbalan Pasti masih bisa melakukan perhitungan NKKIP tersebut sesuai dengan Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 selama Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 masih dalam perbaikan selama 2 (dua) tahun sejak putusan MK.

### 3.3 Perhitungan NKKIP Berdasarkan Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003

Simulasi perhitungan NKKIP dengan menggunakan data karyawan Bunga Konveksi, penulis mengambil contoh sampel untuk perhitungan atasnama Bunga13. Berikut data karyawan atasnama Bunga13:

Nama : Bunga 13  
 Tanggal Lahir : 20 Januari 1978  
 Tanggal Mulai Bekerja : 4 Februari 2016  
 Upah Pokok : Rp2.100.000,-

Asumsi yang digunakan sebagai berikut:

Tingkat bunga aktuarial (diskonto) = 7%

Tingkat kenaikan upah = 8%

Tabel manfaat sesuai dengan Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 yang tercantum dalam Tabel 3

Diketahui :

n = 5 tahun

m = 18 tahun

$$SC_n = \frac{1}{m} \left\{ \sum_{t=1}^m \frac{(1+j)^{m-n}}{(1+i)^{m-n}} \right\} = \frac{1}{18} \left\{ \sum_{t=1}^m \frac{(1+8\%)^{18-5}}{(1+7\%)^{18-5}} \right\}$$

$$\begin{aligned}
 &= 0,05556 \left\{ \begin{matrix} 2,71962 \\ 2,40985 \end{matrix} \right\} &= \sum_{t=1}^m \frac{(1+8\%)^{18-5}}{(1+7\%)^{18-5}} - (18-5) 0,62697 \\
 &= 0,062697 &= \frac{2,71962}{2,40985} - 0,81506 \\
 PVBO_n &= \sum_{t=1}^m \frac{(1+j)^{m-n}}{(1+i)^{m-n}} - (m-n) SC_n &= 0,313485
 \end{aligned}$$

**Hasil NKKIP = PVBO<sub>n</sub> × Faktor Manfaat sesuai Peraturan × Gaji**

$$\begin{aligned}
 &= 0,313485 \times 28,75 \times 2.100.000 \\
 &= 18.926.676,30
 \end{aligned}$$

### 3.4 Perhitungan NKKIP Berdasarkan Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003

Simulasi perhitungan NKKIP dengan menggunakan data karyawan Bunga Konveksi, penulis mengambil contoh sampel untuk perhitungan atasnama Bunga13. Berikut data karyawan atasnama Bunga13:

Nama : Bunga 13  
 Tanggal Lahir : 20 Januari 1978  
 Tanggal Mulai Bekerja : 4 Februari 2016  
 Upah Pokok : Rp2.100.000,-

Asumsi yang digunakan sebagai berikut:

Tingkat bunga aktuarial (diskonto) = 7%

Tingkat kenaikan upah = 8%

Tabel manfaat sesuai dengan Peraturan Pemerintah Nomor 35 Tahun 2021 yang tercantum dalam Tabel 4

Diketahui :

n = 5 tahun

m = 18 tahun

$$\begin{aligned}
 SC_n &= \frac{1}{m} \left\{ \sum_{t=1}^m \frac{(1+j)^{m-n}}{(1+i)^{m-n}} \right\} & PVBO_n &= \sum_{t=1}^m \frac{(1+j)^{m-n}}{(1+i)^{m-n}} - (m-n) SC_n \\
 &= \frac{1}{18} \left\{ \sum_{t=1}^m \frac{(1+8\%)^{18-5}}{(1+7\%)^{18-5}} \right\} & &= \sum_{t=1}^m \frac{(1+8\%)^{18-5}}{(1+7\%)^{18-5}} - (18-5) 0,62697 \\
 &= 0,05556 \left\{ \begin{matrix} 2,71962 \\ 2,40985 \end{matrix} \right\} & &= \frac{2,71962}{2,40985} - 0,81506 \\
 &= 0,062697 & &= 0,313485
 \end{aligned}$$

**Hasil NKKIP = PVBO<sub>n</sub> × Faktor Manfaat sesuai Peraturan × Gaji**

$$= 0,313485 \times 22,75 \times 2.100.000$$

$$= 14.976.761,24$$

### 3.5 Tambahan Simulasi Perhitungan Nilai Kini Kewajiban Imbalan Pasti (NKKIP) dengan Perubahan Asumsi Tingkat Kenaikan Upah dan Asumsi Diskonto

a. Jika asumsi tingkat kenaikan upah lebih kecil daripada asumsi diskonto

Dengan mengambil contoh yang sama atasnama **Bunga13**.

Asumsi yang digunakan sebagai berikut:

Tingkat bunga aktuarial (diskonto) = 8%

Tingkat kenaikan upah = 7%

$$SC_n = \frac{1}{m} \left\{ \sum_{t=1}^m \frac{(1+j)^{m-n}}{(1+i)^{m-n}} \right\}$$

$$= \frac{1}{18} \left\{ \sum_{t=1}^m \frac{(1+7\%)^{18-5}}{(1+8\%)^{18-5}} \right\}$$

$$= 0,05556 \left\{ \frac{2,40985}{2,71962} \right\}$$

$$= 0,0492275$$

$$PVBO_n = \sum_{t=1}^m \frac{(1+j)^{m-n}}{(1+i)^{m-n}} - (m-n) SC_n$$

$$= \sum_{t=1}^m \frac{(1+7\%)^{18-5}}{(1+8\%)^{18-5}} - (18-5) 0,0492275$$

$$= \frac{2,40985}{2,71962} - 0,6399575$$

$$= 0,2461375$$

Hasil dari  $PVBO_n$  adalah 0,2461375, maka hasil NKKIP dengan menggunakan tabel manfaat sesuai Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 yaitu:

$$\text{Hasil NKKIP} = PVBO_n \times \text{Faktor Manfaat sesuai Peraturan} \times \text{Gaji}$$

$$= 0,2461375 \times 28,75 \times 2.100.000$$

$$= 14.860.551,65$$

Dapat dilihat bahwa hasil NKKIP lebih rendah apabila dibandingkan dengan menggunakan asumsi kenaikan upah lebih tinggi daripada asumsi diskonto. Jika membandingkan dengan hasil NKKIP sebelumnya, hasil NKKIP akan lebih rendah jika asumsi tingkat diskonto lebih tinggi dan sebaliknya hasil NKKIP akan lebih tinggi jika asumsi tingkat diskonto lebih rendah.

b. Jika asumsi tingkat kenaikan upah sama dengan asumsi diskonto

Dengan mengambil contoh yang sama atasnama **Bunga13**.

Asumsi yang digunakan sebagai berikut:

Tingkat bunga aktuarial (diskonto) = 8%

Tingkat kenaikan upah = 8%

$$SC_n = \frac{1}{m} \left\{ \sum_{t=1}^m \frac{(1+j)^{m-n}}{(1+i)^{m-n}} \right\}$$

$$= \frac{1}{18} \left\{ \sum_{t=1}^m \frac{(1+8\%)^{18-5}}{(1+8\%)^{18-5}} \right\}$$

$$= 0,05556 \left\{ \frac{2,71962}{2,71962} \right\}$$

$$= 0,05556$$

$$\begin{aligned}
 PVBO_n &= \sum_{t=1}^m \frac{(1+j)^{m-n}}{(1+i)^{m-n}} - (m-n) SC_n &&= \frac{2,71962}{2,71962} - 0,72222 \\
 &&&= 0,277778 \\
 &= \sum_{t=1}^m \frac{(1+8\%)^{18-5}}{(1+8\%)^{18-5}} - (18-5) 0,05556
 \end{aligned}$$

Hasil dari  $PVBO_n$  adalah 0,277778, maka hasil NKKIP dengan menggunakan tabel manfaat sesuai Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 yaitu:

$$\begin{aligned}
 \text{Hasil NKKIP} &= PVBO_n \times \text{Faktor Manfaat sesuai Peraturan} \times \text{Gaji} \\
 &= 0,277778 \times 28,75 \times 2.100.000 \\
 &= 16.770.833,33
 \end{aligned}$$

Dapat dilihat bahwa hasil NKKIP lebih tinggi dibandingkan dengan perhitungan menggunakan asumsi kenaikan upah lebih tinggi daripada asumsi diskonto. Akan tetapi hasil NKKIP ini masih lebih rendah apabila dibandingkan dengan perhitungan menggunakan asumsi kenaikan upah lebih rendah daripada asumsi diskonto atau hasil NKKIP di awal.

### 3.6 Perhitungan Faktor Manfaat sesuai Peraturan Perundangan

- a. Sesuai dengan ketentuan Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003

Cara menghitung manfaat pensiun normal dengan disimulasikan masa kerja 3 (tiga) tahun sebagai berikut.

|                                     |  |
|-------------------------------------|--|
| Besaran Pesangon                    | 4  |
| Besaran Uang Penghargaan Masa Kerja | 2  |
| Besaran Uang Penggantian Hak        | 15% dari uang pesangon dan/atau uang penghargaan masa kerja<br>$15\% \times ((2 \times 4) + 2) = 1,50$ |
| Faktor kali jika pensiun normal     | $(2 \times 4) + (1 \times 2) + (1 \times 1,50) = 11,50$  |

- a. Sesuai dengan ketentuan Peraturan Pemerintah Nomor 35 Tahun 2021

Cara menghitung manfaat pensiun normal dengan disimulasikan masa kerja 3 (tiga) tahun sebagai berikut.

|                                     |  |
|-------------------------------------|--|
| Besaran Pesangon                    | 4  |
| Besaran Uang Penghargaan Masa Kerja | 2  |
| Besaran Uang Penggantian Hak        | Tidak ada  |
| Faktor kali jika pensiun normal     | $(2 \times 4) + (1 \times 2) + (1 \times 0) = 9$ |

### 3.7 Implementasi NKKIP pada Bunga Konveksi

Penerapan NKKIP terhadap Bunga Konveksi sangat penting seperti yang sudah dijelaskan sebelumnya. Berikut hasil dari perhitungan NKKIP sesuai Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 dan perhitungan NKKIP sesuai Peraturan Pemerintah Nomor 35 Tahun 2021 :

Tabel 6 Hasil Perhitungan NKKIP sesuai Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 VS Peraturan Pemerintah Nomor 35 Tahun 2021

| Keterangan        | Jumlah         |
|-------------------|----------------|
| Hasil dari UUK 13 | 250.580.947,59 |
| Hasil dari PP 35  | 197.658.204,04 |
| Selisih           | 52.922.743,55  |

Pada tabel 6, selisih hasil NKKIP dari kedua ketentuan sebesar Rp52.922.743,55. Dapat diartikan bahwa hasil perhitungan NKKIP sesuai Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 sebesar Rp250.580.947,59 **lebih tinggi** dibandingkan dengan hasil perhitungan NKKIP sesuai Peraturan Pemerintah Nomor 35 Tahun 2021 sebesar Rp197.658.204,04.

Dampak untuk Bunga Konveksi jika menggunakan hasil perhitungan NKKIP sesuai Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 yaitu kewajiban atau liabilitas yang nantinya akan dibayarkan kepada pekerja lebih tinggi Rp52.922.743,55 daripada hasil perhitungan Peraturan Pemerintah Nomor 35 Tahun 2021.

Maka dari itu, Bunga Konveksi menggunakan hasil perhitungan NKKIP untuk pensiun normal sesuai Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 dengan peraturan pelaksanaannya Peraturan Pemerintah Nomor 35 Tahun 2021.

#### 4. KESIMPULAN

- a. Bahwa hasil perhitungan NKKIP sesuai Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 dengan menggunakan data karyawan Bunga Konveksi sebesar Rp256.622.627,59.
- b. Sedangkan hasil perhitungan NKKIP sesuai Peraturan Pemerintah Nomor 35 Tahun 2021 dengan menggunakan data karyawan Bunga Konveksi sebesar Rp202.489.671,74.
- c. Bunga Konveksi menggunakan hasil perhitungan NKKIP sesuai Peraturan Pemerintah Nomor 35 Tahun 2021, maka dari itu liabilitas/kewajiban Bunga Konveksi yang harus dicadangkan untuk karyawan pensiun normal sebesar Rp202.489.671,74. Dimana hasil NKKIP tersebut **lebih rendah** sebesar Rp54.132.955,85 dibandingkan hasil NKKIP sesuai Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003.

#### DAFTAR PUSTAKA

- Bayu, Yuki, Ika. (2016). Penerapan Metode *Projected Unit Credit* dan *Entry Age Normal* pada Asuransi Dana Pensiun. Jurnal EKSPONENSIAL.
- Dewan Standar Akuntansi Keuangan Ikatan Akuntan Indonesia. 2006. Panduan Implementasi No.1 : PSAK No. 24 (Revisi 2004) Imbalan Kerja. Jakarta.
- Fitri, Nur Lidia. (2019). Penyajian Dan Pelaporan Mengenai Imbalan Kerja Ditinjau dari PSAK 24. Skripsi. Makassar: Universitas Muhammadiyah Makassar.
- Hassan, M. (2018). Analisis Penerapan Akuntansi Imbalan Kerja Kesesuaiannya dengan PSAK 24 pada Hotel AL-BADAR Makassar. Skripsi. Makassar: Universitas Muhammadiyah Makassar.
- Marzuki. (1991). Metodologi Riset. Yogyakarta: BPFE-UUI.
- Mercy, Grace, Rudy. (2016). Analisis Penerapan PSAK 24 Mengenai Imbalan Kerja pada PT Bank Maybank Indonesia Tbk KCP Kotamobagu. Jurnal EMBA.
- Panduan Implementasi No.1 PSAK No.24 (Revisi 2004) Imbalan Kerja. 2006. Jakarta

Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 45 Tahun 2015 tentang Penyelenggaraan Program Jaminan Pensiun. Jakarta.

Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor 227 Tahun 2020 tentang Aktuaris. Jakarta.

Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2021 tentang Perjanjian Kerja Waktu Tertentu, Alih Daya, Waktu Kerja Dan Waktu Istirahat, Dan Pemutusan Hubungan Kerja. Jakarta.

Standar Akuntansi Keuangan. Edisi 2018. PSAK 24. Jakarta.

Standar Praktik Aktuaria. (1998). Dana Pensiun. Jakarta.

Sugiyono. (2014). Metode Penelitian Pendidikan Pendekatan Kuantitatif, Kualitatif, dan R&D. Bandung: Alfabeta.

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan. Jakarta.

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja. Jakarta.